

Peran Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar di Uptd Kampung Anak Negeri Surabaya

Cindy Eka Mellania Rama Dani¹⁾, Diana Hertati²⁾

^{1,2)}Program Studi Administrasi publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
UPN Veteran Jawa Timur Surabaya, Indonesia

¹⁾cindy.eka27@gmail.com, ²⁾diana.adne2021@gmail.com

ABSTRAK

Permasalahan kesejahteraan sosial di masyarakat mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan fungsi sosial dan mengakibatkan tingginya jumlah masyarakat miskin serta semakin banyaknya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial. Pemerintah dalam hal ini, perlu memperhatikan dan menanggulangi masalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini bermaksud ingin memperoleh deskripsi secara komprehensif dan mendalam tentang peran pelayanan kesejahteraan sosial anak terlantar di UPTD Kampung Anak Negeri Surabaya. Pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi. Dalam penelitian ini metode analisis data yang akan digunakan menurut (Miles, Huberman, and Saldana 2014) dimana analisis data kualitatif dilakukan melalui beberapa tahap yaitu, pengumpulan data (*data collection*), kondensasi data (*data condensation*), tampilan data (*data display*), serta penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion: drawing or verifying*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat empat fokus penelitian yang memiliki kesesuaian peran pelayanan dalam kesejahteraan sosial anak terlantar yang meliputi peran fasilitatif, peran edukasional, peran representasi, dan peran teknis yang dilakukan oleh UPTD Kampung Anak Negeri Surabaya dalam pelayanan kesejahteraan sosial anak terlantar.

Kata Kunci: Peran, Kesejahteraan Sosial, Anak Terlantar

Abstract

*Social welfare problems in the community result in delays in the implementation of social functions and result in a high number of poor people and an increasing number of people with social welfare problems. The government, in this case, needs to pay attention to and address the problem of Persons with Social Welfare Problems (PMKS). This study uses a qualitative research method with a descriptive approach. This study intends to obtain a comprehensive and in-depth description of the Role of Social Welfare Services for Neglected Children at UPTD Kampung Anak Negeri Surabaya. Data collection is done by means of interviews, observation, and documentation. In this study the data analysis method that will be used according to (Miles, Huberman, and Saldana 2014) where qualitative data analysis is carried out through several stages, namely, data collection (*data collection*), data condensation (*data condensation*), data display (*data display*), as well as drawing conclusions or verification (*conclusion: drawing or verifying*). The results of the study show*

that there are four research focuses that have appropriate service roles in the social welfare of neglected children which include a facilitative role, educational role, representational role, and technical role carried out by UPTD Kampung Anak Negeri Surabaya in social welfare services for neglected children.

Keywords: Role, Social Welfare, Neglected Children

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan jumlah populasi yang banyak dan padat. Hal tersebut, akan menimbulkan banyak permasalahan sosial salah satunya adalah kesejahteraan sosial di masyarakat. Kesejahteraan sosial pada masyarakat dapat mengakibatkan tingginya jumlah masyarakat miskin serta semakin banyaknya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (Nuriana 2017). Pemerintah dalam hal ini, perlu memperhatikan dan menanggulangi masalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Sebagaimana pada Undang Undang Dasar

Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 34 ayat (1). Upaya-upaya yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat yaitu dengan memberikan jaminan sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial serta segala bentuk pelayanan sosial. Pemberian pelayanan oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat sebenarnya merupakan bentuk implementasi dari fungsi aparat negara sebagai pelayanan masyarakat dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat (Hertati and Arif 2020). Terdapat 26 kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	
Balita terlantar	Gelandangan
Anak terlantar	Pengemis
Anak berhadapan dengan hukum	Pemulung
Anak jalanan	Kelompok minoritas
Anak dengan kedisabilitas (ADK)	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan
Anak korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)
Lanjut usia terlantar	Korban penyalahgunaan napza
Penyandang disabilitas	Korban <i>trafficking</i>
Tuna susila	Penyandang disabilitas
Korban tindak kekerasan	Pekerja migran bermasalah sosial (PMBS)
Korban bencana alam	Korban bencana sosial
Perempuan rawan sosial ekonomi	Fakir miskin
Keluarga bermasalah sosial psikologi	Komunitas adat terpencil

Sumber : *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial*

Berdasarkan beberapa kategori PMKS diatas yang sering ditemukan di lingkungan sekitar salah satunya yaitu anak terlantar. Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial yaitu anak terlantar merupakan seorang anak yang berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang

mengalami perlakuan salah dan anak yang ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak yang kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga. Jumlah anak terlantar mengalami peningkatan setiap tahun disebabkan tidak adanya pendapatan yang stabil dari orang tua, sehingga tidak terpenuhinya kebutuhan anak atau bahkan keseluruhan rumah tangga keluarga. Hal ini dibuktikan dari data dari Dinas Sosial Kota Surabaya sebagai berikut:

Tabel 1.2 Jumlah Anak Terlantar di Kota Surabaya

Tahun	Jumlah Anak Terlantar (Jiwa)
2019	6.623
2020	6.604
2021	8.546

Sumber : *Data Dinas Sosial Kota Surabaya (2022)*

Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Sosial Kota Surabaya telah membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah yang memiliki 4 (empat) UPTD yang digunakan sebagai penanganan berbagai kasus masalah sosial yang ada di Kota Surabaya. UPTD tersebut diantaranya: UPTD Liponsos Keputih, UPTD Babat Jerawat, UPTD Kampung Anak Negeri Kalijudan, UPTD Griya Wreda, UPTD Kampung Anak Negeri Wonorejo.

UPTD Kampung Anak Negeri dalam melaksanakan penanganan terhadap anak-anak bermasalah sosial salah satunya adalah anak terlantar. Pelaksanaan penanganan mencakup dua proses yaitu proses rekrutmen dan proses pelayanan. Ketersediaan sumber daya manusia yang kurang dibanding dengan jumlah anak diakui oleh kepala UPTD Kampung Anak Negeri terutama di tenaga pendamping yang mendampingi anak-anak selama 24 jam. Mereka terbagi dalam 3 shift yaitu pagi, siang, malam dan satu shift 8 jam kerja. Namun, dalam 1 shift terdapat 1

orang pendamping yang mendampingi 36 anak. Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia 30/HUK/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial pada BAB IV Standar Pelayanan Pengasuhan huruf (d) Standar Pelaksana Pengasuhan, nomor 2 (c) perbandingan anak dengan pengasuh yang menjelaskan bahwa Lembaga Kesejahteraan sosial Anak harus menyediakan 1 (satu) orang pendamping untuk 5 (lima) orang anak asuh dengan skala perbandingan 1:5 baik dalam sistem keluarga maupun wisma.

Permasalahan anak terlantar juga yang belum sepenuhnya terselesaikan terbukti saat ini Kota Surabaya mengalami peningkatan jumlah anak terlantar yang sangat signifikan. Padahal Kota Surabaya telah mendapatkan penghargaan salah satunya yaitu Penghargaan Kota Layak Anak 2018 untuk kategori utama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik

Indonesia. Melihat dari fenomena diatas, maka penulis menggunakan pendekatan analisis teori peran dari Jim Ife (2014). Kajian yang akan dibahas oleh peneliti yaitu peran fasilitatif, peran edukasional, peran representasi, dan peran teknis yang dilakukan oleh UPTD Kampung Anak Negeri Wonorejo Surabaya dalam pelayanan kesejahteraan sosial anak terlantar. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kampung Anak Negeri Wonorejo Surabaya dalam Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar.

B. LANDASAN TEORITIS

Kesejahteraan sosial merupakan suatu tindakan yang dilakukan masyarakat dalam mencapai kehidupan masyarakat yang lebih baik. Selain itu, Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, kesejahteraan sosial merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan masyarakat baik secara material, spiritual dan sosial untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan melaksanakan fungsi sosial dengan baik. Kesejahteraan sosial bertujuan Untuk mencapai kesejahteraan hidup yang layak yaitu dengan terpenuhinya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan, dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya (Haryanto 2019). Dalam hal ini, pemerintah memiliki peran penting dalam tercapainya tujuan kesejahteraan sosial dan memberikan kehidupan yang layak bagi masyarakat. Selain itu, dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan untuk memberikan tingkat

ketahanan sosial yang kuat di masyarakat dalam menghadapi dan menangani sebuah masalah kesejahteraan sosial. Salah satu yang perlu diperhatikan di masyarakat yaitu anak terlantar yang merupakan anak yang kurang mendapatkan didikan, asuhan dari orang tua karena kondisi keluarga yang tidak layak baik segi ekonomi, kesehatan jasmani, psikis dan kondisi sosialnya (Siregar 2019). Sehingga anak-anak tersebut membutuhkan adanya bentuk bantuan pelayanan dari sumber-sumber yang ada di masyarakat maupun pemerintah sebagai pengganti orang tuanya.

Peran merupakan bentuk tanggung jawab dimiliki oleh seseorang maupun instansi pemerintah yang bertugas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya (Fitriana, Hilman, and Triono 2020). Konsep peran juga selalu dikaitkan dengan posisi. Posisi yang pada dasarnya adalah suatu unit dari struktur sosial yang artinya bahwa peran adalah perilaku individu maupun organisasi dalam menjalankan posisi pada suatu unit dari struktur sosial (Sumilat 2021). Menurut Jim Ife dalam (Baturangka, Kaawoan, and Singkoh 2019) peran pengembang masyarakat adalah mengembangkan kapasitas pelaku masyarakat sehingga mampu mengorganisir dan menentukan sendiri upaya-upaya yang diperlukan dalam memperbaiki kehidupan usaha mereka. Pengembangan masyarakat dikelompokkan dalam empat golongan, sebagai berikut :

1. Peran Fasilitator

Peran fasilitator adalah peran yang dicurahkan untuk memfasilitasi, memperkuat, mengakui serta menghargai kontribusi dan kerja yang dimiliki oleh individu maupun kelompok dalam meningkatkan

- produktivitas. Menurut Frank & Tesoriero (2014) peran fasilitas terdapat tujuh peran khusus, antara lain: animasi sosial; mediasi dan negosiasi; pemberian dukungan; membentuk konsensus; fasilitator kelompok; pemanfaatan sumber daya; mengorganisasi.
2. Peran Edukasional
Peran edukasional yaitu membantu pelaksanaan proses peningkatan produktivitas dan berperan aktif dalam memberikan masukan dalam rangka peningkatan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman bagi individu maupun kelompok. Peran edukasional menurut Frank & Tesoriero (2014) ini meliputi: meningkatkan kesadaran; memberikan informasi; pelatihan; dan mengkonfrontasi.
 3. Peran Representasi
Peran representasi merupakan peran pemerintah dalam melakukan interaksi dengan pihak luar demi kepentingan yang bermanfaat. Menurut (Jim Ife 2014) membagi peran representasi menjadi enam sebagai berikut: memperoleh berbagai sumber daya; advokasi; memanfaatkan media massa; hubungan masyarakat dan presentasi publik; jaringan kerja (*networking*); dan berbagi pengetahuan dan pengalaman.
 4. Peran Teknis
Peran teknis merupakan kemampuan para pegawai dalam melakukan pengumpulan dan analisis data, kemampuan menggunakan komputer, kemampuan melakukan presentasi, manajemen serta melakukan pengendalian finansial dan melakukan *need assessment* terhadap pengembangan potensi individu atau kelompok. Peran teknis menurut Jim

Ife dan Frank Tesoriero, (2014) sebagai berikut: pengumpulan dan analisis data; menggunakan komputer; presentasi verbal dan tertulis; dan mengontrol dan mengelola keuangan.

C. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dikutip dalam Moleong (2019) metodologi kualitatif sebagai metode penelitian untuk mendapatkan data secara deskriptif berupa kata yang diuraikan secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil pengamatan terhadap orang atau perilaku seseorang. Penelitian ini bermaksud ingin memperoleh deskripsi secara komprehensif dan mendalam tentang Peran Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar di UPTD Kampung Anak Negeri Surabaya. Sasaran dalam penelitian ini yaitu Kepala UPTD Kampung Anak Negeri Surabaya, tenaga pendamping (pembina kognitif), anak terlantar, dan UPTD Kampung Anak Negeri. Fokus penelitian adalah garis besar dari penelitian, observasi, serta analisis hasil penelitian akan lebih terarah. Sifat fokus penelitian adalah sementara dan akan dikembangkan apabila peneliti telah melakukan observasi di lapangan (Sugiyono 2019). Penelitian ini berfokus pada teori yang dikemukakan oleh Jim Ife dan Frank Tesoriero (2014), yaitu diantaranya memuat peran fasilitatif, peran edukasional, peran representasi, dan peran teknis. Metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi. Dalam penelitian ini metode analisis data yang akan digunakan menurut (Miles et al. 2014) dimana analisis data kualitatif dilakukan melalui beberapa tahap yaitu, pengumpulan data (*data collection*), kondensasi data (*data condensation*),

tampilan data (*data display*), serta penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion: drawing or verifying*). Teknik keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan yang didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Terdapat empat kriteria yang digunakan untuk mendapatkan keabsahan data yaitu uji *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), *confirmability* (objektivitas) Sugiyono (2019).

D. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Menurut Fitriana et al., (2020) peran adalah tanggung jawab dimiliki oleh seseorang maupun instansi pemerintah yang bertugas untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk mengetahui peran apa yang sudah dilakukan Dinas Sosial melalui UPTD Kampung Anak Negeri Wonorejo Surabaya dalam pelayanan kesejahteraan sosial anak terlantar, penulis menggunakan analisis teori peran menurut Jim Ife (2014) yang meliputi peran fasilitatif, peran edukasional, peran representasi, dan peran teknis yang dilakukan oleh UPTD Kampung Anak Negeri Wonorejo Surabaya dalam pelayanan kesejahteraan sosial anak terlantar.

Teori peran oleh Jim Ife (2014) peran fasilitatif UPTD melakukan fungsi sosial animasi dengan memberikan motivasi dan dukungan kepada anak-anak terlantar untuk mengembangkan potensi dan meningkatkan produktivitas. UPTD Kampung Anak Negeri Wonorejo Surabaya juga memberikan pelatihan yang sifatnya ke fisik agar mereka memiliki potensi lain selain di bidang akademik seperti pelatihan tinju, pencak silat, kewirausahaan, balap sepeda dan lain-

lainnya. Peran UPTD dalam mediasi dan negosiasi yaitu proses pelayanan seringkali menghadapi konflik kepentingan atau konflik nilai, dan pada saat ini peran mediator sangat dibutuhkan untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut. Apabila terjadi konflik diantara anak-anak yang ada di UPTD Kampung Anak Negeri Wonorejo Surabaya, maka akan diberikan pengarahan dan pengertian secara terus menerus. Anak terlantar yang ada di UPTD memiliki latar belakang yaitu kurangnya perhatian dan terbiasa terlantar yang sifatnya tidak memiliki rasa takut. Selain itu, anak terlantar cenderung memiliki sifat mencari perhatian ke orang lain. Dalam hal ini, UPTD berperan sebagai mediator dan negosiator dalam menyelesaikan konflik di antara anak-anak tersebut. Peran UPTD dalam pemanfaatan sumber daya yaitu agen perubahan harus mampu mengidentifikasi dan menggunakan berbagai keterampilan dan sumber daya, dalam hal ini yang menjadi agen perubahan adalah pendamping anak yang ada di UPTD tersebut. Namun, fakta di lapangan dalam pemenuhan kebutuhan hak anak masih terdapat kendala dalam ketersediaan tenaga pendamping yang kurang dibanding dengan jumlah anak. Kurangnya tenaga pendamping dapat mempengaruhi dalam pemberian pelayanan menjadi tidak optimal.

Peran edukasional yaitu membantu pelaksanaan proses peningkatan produktivitas dan berperan aktif dalam memberikan masukan dalam rangka peningkatan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman bagi individu maupun kelompok. Pada tahap meningkatkan kesadaran pada anak-anak, pertama-tama kita harus intervensi kepada anak-anak. Ini dirancang untuk membantu individu melihat masalah dari perspektif pribadi dan dari perspektif yang lebih luas.

UPTD Kampung Anak Negeri berupaya memberikan pelayanan yang memadai untuk meningkatkan kesejahteraan anak-anak terlantar dengan memberikan sosialisasi dalam bentuk edukasi. Salah satu yang dilakukan UPTD Kampung Anak Negeri Wonorejo Surabaya untuk meningkatkan kesadaran anak-anak yaitu dengan memberikan edukasi seperti pembinaan minat bakat, pembinaan kognitif, dan pembinaan spiritual. Selain itu, UPTD juga berperan dalam pemberian informasi yang dibutuhkan anak terlantar, membantu pelaksanaan proses peningkatan produktivitas, dan berperan aktif untuk memberikan masukan dalam peningkatan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman bagi anak terlantar. Pelaku perubahan juga harus memberikan informasi yang mungkin belum diketahui. Informasi yang disampaikan harus merupakan informasi yang relevan dan bermanfaat untuk menunjang kesejahteraan sosial. Pemberian informasi tersebut berupa sosialisasi terkait perilaku, sopan santun, dan etika. Peran UPTD dalam pelatihan yaitu peran yang terdapat dalam peran edukasional yang paling spesifik karena secara mendasar lebih memfokuskan kepada upaya untuk memberikan pembelajaran dalam melakukan suatu hal. UPTD Kampung Anak Negeri Wonorejo Surabaya berfungsi sebagai tempat yang memberikan perlindungan, pendidikan, dan bimbingan kepada anak-anak terlantar. Dalam upaya mereka, UPTD berusaha untuk memfasilitasi pelatihan fisik, kognitif, dan spiritual anak-anak terlantar agar mereka dapat menjadi individu yang mandiri dan normatif. UPTD juga memainkan peran dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif dan inklusif, dengan memahami dan memberikan dukungan serta motivasi

kepada anak-anak terlantar yang mungkin menghadapi tantangan emosional atau kurangnya motivasi dalam proses belajar.

Peran representasi merupakan peran pemerintah dalam melakukan interaksi dengan pihak luar demi kepentingan yang bermanfaat. Pada tahap ini, peran UPTD dalam memanfaatkan media massa yaitu media massa dapat dijadikan sebagai pendukung yang efektif dalam mencapai suatu tujuan yang hendak dicapai. UPTD Kampung Anak Negeri Wonorejo memiliki media sosial berupa Instagram untuk sarana menginformasikan kepada publik maupun masyarakat dalam hal kegiatan sehari-hari yang ada di UPTD Kampung Anak Negeri Wonorejo Surabaya, walaupun UPTD sudah memiliki media sosial akan tetapi pelayanan yang diberikan kepada anak terlantar dilaksanakan secara langsung (offline). Selain itu, terdapat kendala lain dalam mengelola media sosial selain instagram berupa Youtube karena belum sumber daya manusia yang kompeten di bidang editor video. Selanjutnya, peran UPTD dalam hubungan masyarakat dan presentasi publik yaitu peran ini terkait kemampuan untuk membuat berbagai presentasi publik, salah satunya saat berada di dalam sebuah pertemuan masyarakat. Peran ini juga berupa keterlibatan dalam suatu pertemuan dengan LSM, pertemuan dengan pemerintah, dan kelompok-kelompok lainnya yang dirasa dapat mendukung dalam upaya meningkatkan kesejahteraan anak terlantar. Di UPTD, keterlibatan LSM dalam pelayanan anak terlantar di UPTD Kampung Anak Negeri Wonorejo Surabaya tidak ada. Namun, terdapat organisasi mahasiswa dari beberapa kampus yang ada di Surabaya maupun dari luar Surabaya melakukan kegiatan-kegiatan di UPTD Kampung Anak Negeri

Wonorejo Surabaya. Kegiatan yang dilakukan di UPTD Kampung Anak Negeri Wonorejo Surabaya meliputi bermain dan belajar. Bermain merupakan bagian penting dalam perkembangan anak, di mana melalui bermain mereka dapat mengembangkan keterampilan sosial, kreativitas, serta fisik yang sehat. Selain bermain, kegiatan belajar juga menjadi fokus di UPTD Kampung Anak Negeri Wonorejo Surabaya. Anak-anak terlantar diberikan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang mereka butuhkan. Peran UPTD dalam berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan pihak luar, dalam hal ini dengan memberikan pengetahuan maupun pengalaman kepada anak terlantar. Pendekatan yang empati dan responsif serta pendidikan moral terhadap perasaan dan kebutuhan anak-anak tersebut dapat membantu menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih inklusif yang akan mendorong pertumbuhan dan perkembangan mereka. Dengan adanya pemahaman dan dukungan ini, diharapkan anak-anak terlantar dapat merasa lebih termotivasi dan terdorong untuk belajar.

Peran teknis merupakan kemampuan para pegawai dalam melakukan pengumpulan dan analisis data, kemampuan menggunakan komputer, kemampuan melakukan presentasi, manajemen serta melakukan pengendalian finansial dan melakukan *need assessment* terhadap pengembangan potensi individu atau kelompok. Terkait dengan kemampuan pegawai UPTD dalam melakukan pengumpulan dan analisis data anak terlantar untuk mengetahui permasalahan dan kebutuhan-kebutuhan dasar secara tepat. Terdapat prosedur dalam pelayanan klien di UPTD Kampung Anak Negeri sebelum anak tersebut dilakukan pembinaan yaitu tahapan

pertama adalah *assessment* (pengungkapan permasalahan klien), tahapan kedua yaitu orientasi, tahapan ketiga *intervensi* yaitu berupa pembinaan yang akan diberikan kepada klien, keempat *terminating* yaitu pemutusan pembinaan yang selanjutnya di evaluasi. Selanjutnya, peran UPTD dalam menggunakan komputer yaitu kemampuan dalam menggunakan komputer sangat penting untuk menunjang berbagai kegiatan yang berhubungan dengan proses pelayanan. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa anak terlantar yang ada di UPTD Kampung Anak Negeri Wonorejo Surabaya tidak ada pembelajaran menggunakan komputer. Apabila anak-anak membutuhkan komputer/laptop untuk mengerjakan tugas-tugas maka akan difasilitasi oleh pendamping UPTD Kampung Anak Negeri Wonorejo Surabaya. Selain itu, pembelajaran dengan menggunakan komputer belum tersedia. Peran UPTD dalam kemampuan untuk melakukan presentasi sangatlah penting dalam menyampaikan ide maupun gagasan yang berpengaruh dalam proses pelayanan. Dalam melakukan presentasi tidak harus dilakukan secara verbal namun juga bisa dilakukan secara tertulis melalui laporan yang bersifat komunikatif. Pada proses penyampaian ide atau gagasan kepada anak-anak terlantar yang ada di UPTD Kampung Anak Negeri Wonorejo Surabaya menggunakan pendekatan secara langsung berupa sosialisasi dan juga pengarahan.

Secara keseluruhan, UPTD Kampung Anak Negeri Wonorejo Surabaya berperan penting dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak-anak terlantar. Melalui peran mereka sebagai fasilitator, UPTD mengupayakan peningkatan kesejahteraan sosial anak-anak terlantar dengan memberikan dukungan, pendidikan, dan

pelatihan yang relevan. Upaya ini didasarkan pada teori peran, teori kesejahteraan sosial, dan teori anak terlantar yang menjelaskan pentingnya peran institusi dalam memberikan perlindungan, bimbingan, dan pelayanan yang baik bagi anak-anak terlantar. Dalam konteks teori peran, UPTD Kampung Anak Negeri berperan sebagai fasilitator dalam memfasilitasi peran sosial anak-anak terlantar melalui pemberian motivasi, dukungan, mediasi, dan negosiasi (Permatasari and Mardiyah 2021). Teori kesejahteraan sosial menggarisbawahi komitmen UPTD dalam meningkatkan kesejahteraan anak-anak terlantar dengan menyediakan pendidikan, informasi relevan, dan program pelatihan yang komprehensif (Syarifah and Prabawati 2021). Selain itu, teori anak terlantar mengakui pentingnya peran UPTD dalam memberikan perlindungan, pendidikan, dan bimbingan kepada anak-anak terlantar untuk memfasilitasi perkembangan mereka menjadi individu yang mandiri dan normatif (Wicaksono and Rusdiana 2019).

UPTD Kampung Anak Negeri Wonorejo Surabaya dalam hal ini berupaya menciptakan lingkungan belajar yang positif dan inklusif bagi anak-anak terlantar. Mereka mengidentifikasi dan memanfaatkan keterampilan dan sumber daya yang tersedia, meskipun menghadapi keterbatasan sumber daya staf pendamping. UPTD menerapkan disiplin dan rutinitas dalam kehidupan anak-anak terlantar melalui kegiatan terjadwal. Dengan pendekatan ini, UPTD berusaha untuk memberdayakan anak-anak terlantar agar mereka dapat mengoptimalkan potensi mereka dan mencapai kemandirian (Syarifah and Prabawati 2021). Dengan begitu, UPTD Kampung Anak Negeri Wonorejo Surabaya memainkan peran

penting dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak-anak terlantar. Melalui pendidikan yang berkelanjutan, panduan, dan dukungan yang diberikan, UPTD meningkatkan kesadaran anak-anak terlantar, memberikan informasi yang relevan, serta menyelenggarakan program pelatihan yang komprehensif untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemandirian mereka. Upaya ini bertujuan untuk memberdayakan anak-anak terlantar agar mereka dapat menjadi individu yang produktif dan mandiri sesuai dengan visi dan misi institusi UPTD Kampung Anak Negeri Wonorejo Surabaya.

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

Peran UPTD Kampung Anak Negeri Wonorejo Surabaya dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak-anak terlantar sangat penting, karena melalui pendidikan, panduan, dan dukungan yang diberikan, mereka meningkatkan kesadaran anak-anak terlantar, memberikan informasi yang relevan, serta menyelenggarakan program pelatihan yang baik yang berguna di masa depan. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kampung Anak Negeri Wonorejo Surabaya memiliki peran dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak-anak terlantar, berperan sebagai fasilitator, mediator dan negosiator. UPTD berfokus pada memenuhi kebutuhan anak-anak terlantar dan mendukung kesejahteraan sosial mereka melalui pemberian motivasi, dukungan, dan pengembangan potensi dengan tujuan memfasilitasi perkembangan fisik, kognitif, dan spiritual mereka. UPTD memainkan peran penting dalam membentuk peran sosial kepada

anak-anak terlantar melalui pemanfaatan media massa, hubungan dengan masyarakat, dan memberikan pengalaman dan pengetahuan. UPTD Kampung Anak Negeri Wonorejo Surabaya berupaya memberikan pendidikan secara teknologi kepada anak-anak terlantar. Terdapat tantangan yang dihadapi UPTD dalam memberikan pelayanan yang memadai, terutama terkait keterbatasan sumber daya staf yang menghambat implementasi rasio perawat yang optimal. UPTD berusaha untuk mengatasi tantangan tersebut dengan tetap memberikan disiplin, rutinitas, dan pendidikan yang berkelanjutan kepada anak-anak terlantar.

2. Rekomendasi

Menurut hasil dari kesimpulan diatas, maka rekomendasi dari adanya penelitian ini diantaranya yaitu:

- a. Untuk mengatasi keterbatasan sumber daya staf yang mempengaruhi implementasi rasio perawat yang optimal, UPTD perlu mempertimbangkan penambahan jumlah staf yang sesuai dengan jumlah anak-anak terlantar yang dilayani. Hal ini akan memungkinkan pemberian perawatan dan perhatian yang lebih baik serta pemenuhan kebutuhan individual setiap anak.
- b. UPTD Kampung Anak Negeri Wonorejo Surabaya dapat menjalin kerjasama dengan organisasi non-pemerintah ataupun dari organisasi swasta yang memiliki pengalaman dan sumber daya tambahan dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak-anak terlantar. Melalui kerjasama ini, UPTD dapat memperluas jaringan dan mendapatkan dukungan yang lebih luas dalam menghadapi tantangan yang dihadapi.
- c. UPTD perlu terus mengembangkan program pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak terlantar. Program-program ini harus meliputi aspek-aspek kognitif, fisik, dan spiritual, serta mempertimbangkan perkembangan individu anak. Selain itu, penting untuk melibatkan anak-anak terlantar dalam perencanaan dan pelaksanaan program agar mereka merasa memiliki peran aktif dalam pengembangan diri mereka.
- d. UPTD harus terus memperkuat dukungan emosional dan motivasi kepada anak-anak terlantar dalam proses belajar dan perkembangan pribadi mereka. Memahami tantangan yang mereka hadapi dan memberikan perhatian serta dorongan positif akan membantu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan memotivasi mereka untuk meraih kemajuan.

REFERENSI

- Anon. n.d. *Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.*
- Anon. n.d. “Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.”
- Baturangka, Theresia, J. .. Kaawoan, and Frans Singkoh. 2019. “Peran Dinas Sosial Kota Manado Dalam Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas.” *Jurnal Eksekutif* 3(3):1–9.
- Fitriana, Fitriana, Yusuf Adam Hilman, and Bambang Triono. 2020. “Peran Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Dalam Upaya Pelestarian Kesenian Budaya Lokal.” *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial*

- Dan Politik* 2(1):1.
- Haryanto, Rudi. 2019. “Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat Duri Di Tengah Social Distancing Pandemi Covid-19.” *Jurnal Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat* 3(2).
- Hertati, Diana, and Lukman Arif. 2020. *Pengembangan Model Pelayanan Publik Yang Berkualitas Berbasis Web Pada Kecamatan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo*. 1st ed. Yogyakarta.
- Jim Ife, Frank Tesoriero. 2014. *Community Development : Alternatif Pengembangan Masyarakat Di Era Globalisasi*.
- Kementerian Sosial. 2011. *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia 30/HUK/2011 Tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial*.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, and Johnny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (Third)*. SAGE Publications.
- Moleong, Lexy J. 2019. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Nuriana, Rika. 2017. “Pemberdayaan ‘PMKS’ (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) Lansia Terlantar Di UPTD Griya Werdha Kota Surabaya.” *Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga* 1–8.
- Permatasari, Novita, and Sjafiatul Mardiyah. 2021. “Peran Pekerja Sosial Dalam Pembelajaran Daring Anak Jalanan Slow Learner Di UPTD Kampung Anak Negeri Kota Surabaya.” *J+Plus Unesa* 10(1):396–407.
- Siregar, Rizka Azizah. 2019. “Pemenuhan Hak Pemeliharaan Anak Terlantar di Kota Medan.”
- Sosial, Kementerian. 2012. *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial*.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumilat, RD. 2021. “Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Pasar Tradisional (Studi di Pasar Langowan).” *Jurnal Politico* 10(3).
- Syarifah, Vivi Roudlotus, and Indah Prabawati. 2021. “Kampung Anak Negeri Sebagai Wujud Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya Dalam Penanganan Anak Jalanan.” *Publika* 9(3):167–80. doi: 10.26740/publika.v9n3.p167-180.
- Wicaksono, Setyo Adhi, and Emmilia Rusdiana. 2019. “Pelaksanaan Hak Anak Terlantar Pada Bidang Pendidikan Di Kota Surabaya.” 6(3):1–23.